



# DPRD Kritisi Pengalihan Anggaran

**P**ENGALIHAN anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dikritisi Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Bidang Pembangunan, Rois Handayana Syaucie, dalam rapat pembahasan, kemarin.

Pengalihan anggaran itu terjadi di dalam 106 mata anggaran. Sebagian besar terjadi di bidang Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PSKLH) yang berkaitan dengan pembangunan rumah susun dan tata ruang dengan 51 pengalihan anggaran serta bidang pemerintahan dengan 49 anggaran.

Di bidang pemerintahan, pengalihan anggaran terjadi pada anggaran rehabilitasi gedung dari dinas perumahan dan gedung pemerintah daerah ke beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti dinas pendidikan untuk rehabilitasi gedung sekolah. Pengalihan lainnya terjadi dari dinas perumahan ke dinas kesehatan serta suku dinas kesehatan dan wali kota.

Menurut Rois, seharusnya Pemprov DKI tidak langsung mengalihkan anggaran tersebut dari dinas perumahan, sebab jika dilihat tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dinas perumahan dan gedung pemda sudah cukup memiliki wewenang untuk membawahkan anggaran rehabilitasi berbagai gedung milik pemerintah daerah seperti gedung sekolah negeri, puskesmas, serta kantor camat dan lurah.

"Memang Kemendagri itu melihat tupoksi saat mengoreksi, tetapi tergantung dari sudut pandang mana tupoksi itu dilihat. Kalau menurut saya, yang dilakukan pemprov bahwa rehab berbagai

gedung milik pemda di dinas perumahan dan gedung pemda sudah benar," kata Rois.

Terlebih, perbaikan jalan permukiman tidak lagi diberikan pada dinas perumahan dan gedung pemda, tetapi dialihkan ke dinas bina marga.

Selain pengalihan anggaran, DPRD juga mengkritisi anggaran hasil koreksi dari Kemendagri sebesar Rp1,1 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan tanggul A pendukung National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Menurut anggota Banggar DPRD DKI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Inggar Joshua, anggaran tanggul A sudah sepakat untuk dikurangi saat pembahasan di tingkat komisi. Karena itu, ia pun merasa ironis jika sekarang anggaran tanggul A senilai Rp120 miliar di dinas tata air itu akan ditambahkan.

## Rugi Rp50 miliar

Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya AKB Ajie Indra menaksir ada kerugian negara sebesar Rp50 miliar dari kasus dugaan penyelewengan dana proyek pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) dalam APBD DKI 2014.

"Taksiran kasarnya Rp50 miliar, tapi untuk pastinya harus menunggu audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," katanya.

Proyek pengadaan UPS dilakukan dengan 49 kali proses lelang. Penyidik pun menduga telah terjadi indikasi penyelewengan anggaran, tetapi belum diketahui di level mana permainan itu berlangsung. "Total tiap paket (UPS) lebih kurang Rp5,8 miliar. Masih kita dalami di mana *mark up*-nya."

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar meminta Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. (Put/Gol/J-1)

Ada pengalihan 106 mata anggaran di dalam RAPBD DKI hasil evaluasi Kemendagri. Pemprov dan DPRD diberi waktu 7 hari untuk membahasnya.